

KI HADJAR DEWANTARA

demokrasi dan leaderschap

tjetakan ketiga

Madjelis Luhur Taman Siswa Jogjakarta.

KI HADJAR DEWANTARA

DEMOKRASI
dan
LEIDERSCHAP



1964

Tjetakan ketiga

Madjelis Luhur Taman Siswa Jogjakarta

KATA PENGANTAR.

Dengan penuh kegembiraan kami persembahkan buah tangan Ki Hadjar Dewantara ini kepada seluruh Rakyat Indonesia, sebagai sumbangan Taman Siswa untuk menjongsong pelaksanaan sistim demokrasi jang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Seperti telah diketahui oleh umum Taman Siswa sudah sedjak lahirnja selalu membimbing segenap keluarganya dengan berpedoman pada „demokrasi dan leiderschap” atau apa jang sekarang lazim disebut „demokrasi dibawah hikmah kebidjaksanaan” atau „demokrasi terpimpin”.

Semoga sumbangan kami ini dapatlah kiranja memberikan djuga manpaatnja bagi perkembangan demokrasi ditanah-air kita ini dan bagi pembangunan masarakat kita menudju masarakat adil dan makmur.

Jogja, 2 Mei 1959.

MADJELIS LUHUR TAMAN SISWA.

*

PENGANTAR PADA TJETAKAN KEDUA.

Dalam waktu jang singkat ternjata buah tangan almarhum Ki Hadjar Dewantara : „Demokrasi dan Leiderschap” telah habis. Pada tjetakan kedua ini tidak ada perubahan-perubahan isi, hanja ada penambahan gambar almarhum.

Kami serahkan buku ketjil jang berharga ini kepada masarakat.

Jogja, 3 Djuli 1959.

MADJELIS LUHUR TAMAN SISWA.

*

PENGANTAR PADA TJETAKAN KETIGA.

Karja Ki Hadjar Dewantara terakhir ini ternjata mendapat perhatian dari masarakat, hingga perlu diterbitkan kembali sebagai tjetakan ketiga.

Pada penerbitan ini tidak ada perubahan mengenai isinja. Mengenai gambar-gambar dan ukuran kitab diadakan perubahan disesuaikan dengan penerbitan-penerbitan lainnja dari Taman Siswa.

Jogjakarta, 8 Djanuari 1964.

PENERBIT.

DASAR LAHIR DAN DASAR BATIN.

Mungkin ada pembatja mengira, bahwa saja setjara langsung akan ikut membitjarakan kehebohan tentang soal „Demokrasi terpimpin” seperti jang kini mendjadi pertikaian hangat dalam masarakat kita. Bukan demikianlah maksud saja. Saja hanja ingin mentjeriterakan dalam karangan saja jang pendek ini, sedikit sedjarah tentang lahirnja kedua istilah, baik „Demokrasi terpimpin” maupun „Demokrasi dan Leiderschap”. Antara kedua-duanja memang ada hubungan pengertian, namun kemudian soal „Demokrasi terpimpin” semata-mata digunakan, hanja untuk keperluan politik dalam fase perdjjuangan rakjat kita pada waktu belakangan ini. Sebaliknja „Demokrasi dan Leiderschap” tetap mendjadi dasar fikiran mengenai sjarat-sjarat ketertiban dan kedamaian dalam segala usaha pendidikan dan organisasi seperti jang diadatkan dalam dunia Taman Siswa. Itulah sebabnja saja tidak mulai dengan menggunakan kata-kata „Demokrasi terpimpin”, melainkan ingin membitjarakan istilah „Demokrasi dan Leiderschap” serta pengertiannja, jang didalam sedjarah Taman Siswa dianggap sendi hidup dan penghidupannja. Mungkin nanti pada achir pandangan saja ini ada kesempatan bagi saja untuk menjinggung-njinggung tentang kemungkinan melaksanakan sembojan „Demokrasi dan Leiderschap” dan „Demokrasi terpimpin” bagi pergerakan rakjat dimasa ini. Tentang maksud dan arti sendi ke-Tamansiswa-an ini pada tingkat pertama ialah harus adanja hubungan antara asas kerakjatan dengan tjita-tjita peri-keadaban manusia, agar demokrasi tidak „salah kedadèn” atau bertumbuh salah mendjadi keadaan jang tak teratur atau „chaos”. Hubungan itu bersifat mutlak dan memang sebenarnja tak mungkin dipungkiri. Untuk djelasnja kita ambil suatu gambaran misal. Pada tiap-tiap gambar-lingkaran (cirkel) misalnja, titik-titik jang merupakan lingkaran tadi sungguh ada dan berhak menduduki tempatnja masing-masing, jang satu bebas dari jang lain. Sekalipun begitu segala titik-titik tadi tidak dapat membatalakan hukumnja, jaitu harus sama djaraknja dengan „titik pusat” dalam lingkaran itu. Dengan adanja titik-titik lingkaran jang berdiri sendiri-sendiri, namun tidak menjimpang dari hukum bersamaan djarak dari titik pusat tersebut, maka berwujudlah gambaran sirkel jang sempurna dan tertentu besar ketjilnja.

Dalam pada itu harus diingat, bahwa pada gambaran lingkaran itu hanya garis lingkarannya sadjalah jang dapat dilihat, sedang titik pusatnja tidak nampak karena tidak tergambar. Memang sebenarnya dalam membanding-banding benda-benda atau hal-hal jang mempunyai bentuk persamaan itu biasanja sifat kesatuannya jang fundamenteel tidak dapat tertangkap oleh pantja-indera manusia dan hanya dapat difahamkan melalui djalan kedjiwaan. Misalnja „kesatuan manusia sedunia” dalam hidup dan penghidupannya tidak dapat terlihat langsung dengan pantja-indera, namun dipandang dari sudut batin tak dapat dipungkiri.

Dalam soal „Demokrasi dan Leiderschap” tidak berbeda halnja. Tiap-tiap anggota masarakat berhak dan berkuasa menentukan bentuk dan tempatnja masing-masing, berhak dan berkuasa pula mewudjudkan hidup dan penghidupannya setjara bebas dan merdeka, mengisi alamnja serta menetapkan langkah-lakunja menurut kodrat dan kepentingannya sendiri-sendiri. Tetapi dalam pada itu untuk memenuhi sjarat-sjarat kesatuan dalam lingkungan hidup perikemanusiaan jang tak boleh menjimpang dari hukum tertibnja lahir dan damainja batin perlulah adanja pimpinan jang satu, pimpinan jang mungkin tak terlihat, namun harus diakui dan ditaati setjara mutlak.

Mengenai sjarat „Demokrasi dan Leiderschap” seperti jang dimaksudkan dalam sembojan Taman Siswa itu, maka jang diartikan dengan istilah „Leiderschap” tidaklah lain dari pimpinan daripada „Kebidjaksanaan”, yakni nilai kebatinan didalam hidup manusia jang menurut ajaran adab dianggap pusat gerak-gerak kedjiwaan jang mengandung unsur-unsur : benar dan adil.

*

DEMOKRASI DIBAWAH HIKMAH KEBIDJAKSANAAN.

Soal „Demokrasi dan Leiderschap” sebenarnya berasal dari almarhum **Ki Ageng Sutatmo Surjokusumo**, ketua pinise-puh jang pertama dari Lembaga Taman Siswa. Beliau adalah anggota Pengurus Besar „Boedi Oetotmo”, jang sebagai wakil organisasinja duduk didalam „Volksraad”. Sebagai pemimpin B.O. Sutatmo termasuk golongan jang boleh dikata radikal dalam arti kedjiwaan. Setjara sambil lalu boleh disini diketahui, bahwa Sutatmo Surjokusumo oleh Pemerintah

Hindia - Belanda dipetjat dari djabatannja selaku Opzichter B.O.W., karena dengan sengadja beliau menolak perintah Djawatan Pekerdjaan Umum untuk mengganti bahan serambi jang terbikin dari bambu dengan kaju. Maksud beliau ialah mempertahankan bambu sebagai bahan jang murah untuk perumahan rakjat.

Selain nasionalistis dan radikal, Sutatmo Surjokusumo itupun berdjawa religieus budhistis dan karenanja menundjukan watak filosofis. Sesuai dengan sifat kedjiwaannja tersebut beliau mendjadi pemimpin dari „Pagujuban Selasa - Kliwon” atau disingkat „Sa - Ka” bersama-sama dengan Pangeran Surjomataram jang kini terkenal sebagai pinisepuh dari gerakan „Ilmu Begdjo”. Pagujuban Selasa - Kliwon tersebut pada tiap-tiap malam Selasa - Kliwon mengadakan pertemuan untuk membahas pelbagai masaalah jang semuanja berkisar pada inti dari tjita-tjitanja, jaitu : „mangaju - aju salira, mangaju - aju bangsa dan mangaju - aju manungsa” (= membahagiakan diri, membahagiakan bangsa dan membahagiakan manusia). Sebagai fakta sedjarah patutlah disini saja terangkan, bahwa sesudah berdirinja **Lembaga Pendidikan Taman Siswa** jang berdasarkan kebudajaan bangsa pada tahun 1922, maka Pagujuban Selasa - Kliwon memutuskan untuk membubarkan diri dengan alasan : „karena tjita-tjita Selasa - Kliwon telah terwujud”. Ada baiknja disini disebutkan, bahwa beberapa anggota dari „Sa - Ka” mendapat tugas mendampingi usaha Taman Siswa, jang waktu itu sudah melakukan persiapan selama 1 tahun dibawah pimpinan **Suwardi Suryaningrat** dengan isteri. Selandjutnja oleh pimpinan Taman Siswa ditetapkan Sutatmo Surjokusumo sebagai Ketua I, Ki Ageng Surjoputro sebagai Ketua II dan S. Suryaningrat, jang sudah 1 tahun menjiapkan Taman-Indrya dan Taman-Guru-nja, sebagai „Pemimpin Umum” dengan „vrij mandaat” atau „tugas bebas”. Selain itu marhum B.R.M. Subono, Sutopo Wonobojo, Pronowidigdo, Tjokrodirdjo bersama-sama dengan Nji Suwardi Suryaningrat diangkat sebagai Pinisepuh-pinisepuh Lembaga Taman Siswa.

*

KEKUASAAN DJUMLAH.

Marilah kita kembali pada lahirnja sembojan „Demokrasi dan Leiderschap”. Dalam salah satu pertemuan Pagujuban „Selasa - Kliwon” oleh Sutatmo Surjokusumo dipersoalkan masaalah „Demokrasi” seperti jang pada waktu itu, disekitar tahun 1919, mulai dibitjarakan oleh golongan-golongan per-

gerakan rakjat. Menurut faham Sutatmo Surjokusumo perkembangan tjita-tjita demokrasi makin lama makin njata hampir semata-mata mengikuti laku-fikiran setjara Barat. Bukan „kerakjatan” dalam arti jang sebenarnya dan jang mengutamakan ideologi atau tjita-tjita, melainkan menurut faham Barat jang mementingkan djumlah suara dari mereka jang ikut menjetudjui sesuatu pendapat. Dalam pada itu jang dianggap „benar” ialah separo dari djumlahnja suara ditambah satu, jang dalam bahasa Belanda terkenal dengan kata-kata „de helft plus één”. Menurut Sutatmo Surjokusumo hal demikian itu merupakan apa jang disebut : „macht van de sterkste”, jaitu „kekuasaan dari pada jang terkuat”, sekalipun disini hanya berupa kekuatan suara. Djadi sama dengan tradisi didjaman purba jang hanya mengakui kekuasaan daripada jang „fysik paling kuat” atau „paling besar”. Djadi bukan jang „benar” dan jang „adil” jang diakui berkuasa.

Patutlah diketahui, bahwa Sutatmo Surjokusumo, jang diwaktu itu menerbitkan madjalah „Weder - opbouw”, men-tjantumkan pada halaman-kulit dari orgaan-nja tersebut, sembojan jang berbunji :

- *) Keindahan jang membatasi Kekuasaan,
Kekuasaan jang memudja Tjintakasih,
Kebidjaksanaan jang membawa Keadilan.

Teranglah dari sembojan itu, bahwa menurut S. Surjokusumo kekuasaan harus bersandar pada „keindahan” atau tertibnja lahir serta „tjintakasih” atau kesutjian batin. Dalam pada itu „kebidjaksanaan” itulah jang mengandung kebenaran dan keadilan.

*

-
- *) Schoonheid die Macht regeert ;
Macht die Liefde looft ;
Wijsheid die Recht doet wedervaren.

SAMA RATA SAMA RASA.

Perlu pula disini saja sebutkan nama seorang pemimpin pergerakan rakjat lain, jang ikut menganalisa serta menolak arti perkataan „Demokrasi” menurut faham Barat. Pemimpin itu ialah marhum Mas Marco, pemuka Sarikat Islam jang kemudian mendjadi Komunis, lalu di-Digulkan dan meninggal ditempat pembuangannja di Boven Digul. Menurut Marco, demokrasi setjara Barat semata-mata berarti „sama-rata”. Dalam pengertian „sama-rata” itu tidak terkandung „kebahagiaan jang sama”. Jang dipentingkan hanya samanja bahan jang dibagi, djadi bukan orang-orangnja jang harus menerima pembagian. Djadi njatalah, bahwa sungguh „sama” bagian-bagian jang dibagi, tetapi untuk jang menerima tidaklah sama „rasanja” atau „bahagianja”, sehingga jang berlaku adalah demokrasi jang tidak adil. Karena itu Mas Marco menggunakan istilah „sama-rata sama-rasa”. Memang benarlah tafsiran Marco tersebut sungguh-sungguh mengandung unsur-unsur „Kerakjatan” dan „Keadilan Sosial”.

Keterangan tentang *Mas Marco*.

Mas Marco adalah seorang wartawan ulung jang sekalipun mulai dengan pendirian Islam, namun lambat-laun beralih pada ideologi Nasionalis dan Komunis. Selama bergerak, Mas Marco selalu bekerdja bersama dengan K.H. Dewantara. Dialah pula jang dalam 2 - 3 hari ber-turut² berhasil mengumpulkan derma dari berbagai kalangan, hingga tjukup untuk perbekalan Nj. Dr. Tjipto, Nj. Suwardi Suryaningrat dan Nj. Douwes Dekker beserta anak-anak, jang semuanya ingin ikut ketempat pembuangan di Nederland. Kemudian Marco sendiri menjusul ke Nederland untuk menéngok keadaan kawan-kawannja dalam pembuangan, djuga untuk mempeladjar keadaan kebudajaan dan kesusilaan jang terdapat didalam masarakat di Nederland. Demikian achirnja ia berpendirian dengan jakin, bahwa rakjat Nederland tidak mungkin dapat memberi bimbingan jang tjukup bertanggungjawab terhadap kemadjuan kesusilaan dan kebudajaan rakjat Indonesia.

*

TUT WURI ANDAJANI.

Bagi saja sendiri jang menginginkan terlaksananja „Demokrasi dibawah pimpinan Kebidjaksanaan” à la Sutatmo Surjokusumo serta faham Mas Marco „sama-rata sama rasa”, saja berkewadjiban menjesuaikan sembojan-sembojan tersebut dengan tjita-tjita pendidikan serta sifat

organisasi jang harus memadai kepribadian Bangsa kita. Seperti diketahui, pendidikan Taman Siswa bertjita-tjitakan menjokong berkembangnja djiwa-raga anak-anak setjara bebas dan menudju kearah adab peri-kemanusiaan. Untuk mentjapai tjita-tjita pendidikan tersebut kita menggunakan sembojan jang amat singkat, namun amat djelas artinja. Sembojan itu berbunji: „Tut wuri andajani”. Tut wuri berarti mengikuti dibelakang, tetapi tidak melepaskan anak-didik kita dari pengawasan. „Berdjalan dibelakang” berarti memberi kebebasan ‘kepada anak-anak untuk melatih mentjari djalan sendiri, sedangkan sebagai pendidik kita wadjib memberi koreksi dimana perlu, misalnja bila anak menghadapi bahaya jang tak dapat dihindarinja dengan fikiran atau tenaga sendiri. Kebebasan inilah jang sebenarnja merupakan demokrasi, sedangkan „pimpinan” jang wadjib terus mengawasi tidak lain daripada kebidjaksanaan sang pamong. Dengan perkataan lain didalam perkembangan hidup anak-anak harus ada „demokrasi dan leiderschap”, atau „demokrasi terpimpin”.

*

K E L U A R G A .

Soal kedua jang harus kita petjahkan berhubung dengan sembojan „demokrasi dan leiderschap” ialah jang mengenai hidup dan penghidupan Taman Siswa sebagai „Lembaga” jang harus berbentuk badan jang teratur jang merupakan „Organisasi”. Mengenai hal ini dalam Peraturan Besar Taman Siswa dapat kita batja, bahwa organisasi Taman Siswa adalah organisasi Kekeluargaan. Maksud pembatasan itu ialah, bahwa segala peraturan harus disandarkan pada hidup kekeluargaan. Selandjutnja diterangkan, bahwa segala peraturan tadi tidak sadja harus organisatoris, tetapi djuga harus organis. Djadi seperti jang dapat kita lihat didalam hidup Keluarga. Ini berarti, bahwa Taman Siswa harus merupakan Badan jang teratur, tetapi djangan sampai peraturan-peraturannja berbentuk „mesin” jang bekerdja tanpa fikiran (machinaal atau mechanis), melainkan harus „hidup”. Peraturan Besar dan Peraturan-peraturan Khusus hanya perlu untuk sekedar mendjelaskan garis-garis besarnja dan harus diubah atau diganti apabila ternjata bertentangan dengan kenjataan atau realiteitnja. Djadi kita harus mementingkan kenjataan; bukan perkataan-perkataannja jang tertulis.

Dari uraian-uraian diatas ternjatalah, bahwa Taman Siswa sebagai „Perguruan” dan sebagai „Badan Persatuan” ada berbentuk **Keluarga**, baik dalam sifat batinnja maupun dalam bentuk lahirnja. Adapun isi dan iramanja harus disesuaikan dengan djaman jang kita tempati ini dan kita sesuaikan dengan djiwa masarakat kita sekarang.

*

ARTI PERKATAAN KELUARGA.

Untuk menjempurnakan analisa dan pandangan kita diatas, baiklah kita renungkan apa sebenarnya arti perkataan **Keluarga** ini. „Keluarga” sebenarnya berasal dari perkataan-perkataan „Kawula” dan „Warga”. „**Kawula**” berarti „abdi” jang berkewadjiban mengabdikan diri dan menjerahkan segala tenaganja kepada jang olehnja dianggap „Tuannja”. Sebaliknya **Warga** berarti „anggota” jang bertanggung-djawab, jang berwenang ikut mengurus, ikut memimpin dan ikut menetapkan segala apa jang perlu dilaksanakan. Njatalah disini, bahwa sebagai „kawula” atau „abdi” iapun betul-betul berkedudukan sebagai „tuan” pula. Kedua matjam kedudukan tadi (jang dalam filsafat kebangsaan kita dianggap penting dan serius) tjukup terkenal dengan adanja istilah „Kawula-Gusti”, yakni bersatunja manusia dan Tuhannja.

Kepada siapakah kita harus mengabdikan diri ? Tidak lain ialah kepada kesatuan Kawula - Gusti tadi. Dan ini berarti mengabdi kepada **keselamatan dan kebahagiaan keluarga selengkapnja**. „Aku” dan „kita” bersatu-padulah disini. Luluh mendjadi satu. Persatu-paduan ini dimungkinkan dan mendjadi kenjataan sepenuhnya, karena adanja pertalian batin didalam Keluarga jang berdasarkan **tjintakasih** jang sutji murni. **Tjintakasih** jang tidak dipaksakan, melainkan jang timbul dengan sendirinja didalam hidup Keluarga. **Tjintakasih** inilah jang menimbulkan kesediaan untuk berkorban.

Selain itu ada pula anasir-anasir persatuan jang tidak kalah pentingnja ; jaitu adanja **demokrasi dan kesedjahteraan bersama**. „Demokrasi” didalam Keluarga tidak hanya berarti „sama-rata”, tetapi djelas bersjarat „sama-rasa” djuga. Istilah „sama-rata dan sama-rasa” ini sebenarnya mengandung suatu pengertian : **demokrasi dan keadilan sosial**. Demokrasi jang mengandung Keadilan Sosial inilah jang sedjak 3 Djuli 1922 (berdirinja Taman Siswa) kita

sebut „demokrasi dan leiderschap” atau „demokrasi terpin-
pin”. Jaitu demokrasi jang tidak meluap-luap dan
menimbulkan „anarchie”, tetapi demokrasi jang dipimpin
oleh „kebidjaksanaan” dalam arti keinsjafan akan adanja
„kesedjahteraan bersama”.

Teringatlah kita kembali kepada marhum Sutatmo
Surjokusumo jang didalam Volksraad pernah mengeluarkan
utjapan : „Demokrasi zonder wijsheid is een ramp voor ons
Volk !”. Artinja : bahwa Demokrasi tanpa kebidjaksanaan
pastilah mendatangkan bentjana bagi rakjat kita.

Ada lagi anasir didalam hidup Keluarga jang tak boleh
dilupakan, jaitu selalu adanja sikap **toleransi**. „Toleransi”
tak lain artinja daripada sikap **murah hati** ; jaitu membiarkan
orang lain hidup menurut kehendaknja sendiri. Sikap inilah
jang mendjadi pupuk untuk berkembangnja rasa **bebas** dan
merdeka serta pula rasa **tanggung-djawab**.

Masih ada lain-lain tjorak rasa batin, misalnja : tidak
adanja nafsu untuk **menguntungkan diri** dengan **merugikan**
anggota lainnja ; tiada pula keinginan **mewudjudkan penguasa**
diri atas anggota-anggota lainnja. Demikian seterusnya masih
banyak hal-hal jang dapat mendatangkan **ketertiban lahir**
dan **kedamaian batin** dalam hidup Keluarga. Semuanja itu
tidak perlu kita rangkaikan disini dan dapatlah kita masing-
masing menjelidikinja sendiri. Bagaimanapun djuga njatalah
dari segala uraian dimukan tadi, bahwa Keluarga itu
sungguh-sungguh mewudjudkan hidup bersama atau „masa-
rakat” jang paling ketjil, namun mengandung inti-inti jang
mengenai keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia seleng-
kapnja dan boleh ditjontoh oleh masarakat besar.

Dalam pada itu bagi kita kaum Taman Siswa djelaslah
dari apa jang kita tjantumkan diatas itu, bahwa sifat dan
bentuk, serta isi dan irama hidup kekeluargaan sungguh perlu
untuk mempertahankan keselamatan dan kebahagiaan kita
bersama serta kesatuan Organisasi kita sebagai Keluarga
Besar Taman Siswa.

*

PELAKSANAAN UNTUK ORGANISASI KELUARGA.

Setelah memahami arti dan maksud kedua sembojan
seperti diuraikan diatas, maka perlulah kini kita ketahui
lebih landjut, bagaimana tjaranja kita dapat melaksanakan
kedua tjita-tjita tadi. Demokrasi dan Leiderschap, pun
djuga Demokrasi Terpimpin mengharuskan adanja pimpinan

jang bidjaksana sebagai djaminan akan tertib - damainja „hak diri”, hal mana disini merupakan bagian jang pokok. Djanganlah hendaknja kebebasan diri itu meluap-luap menimbulkan anarchie seperti jang telah saja katakan dimuka. Untuk itu perlu adanja kejakinan, bahma „kepentingan diri” seseorang harus takluk kepada „kepentingan umum” masarakat. Dan karenanja perlu ada pihak ketiga jang dapat diterima sebagai „hakim”, jang atas dasar kebenaran dan keadilan dapat menentukan, dimana letaknja kebenaran dan keadilan. Seperti kita ketahui menurut faham Demokrasi dan Leidershap hanja Kebidjaksanaanlah jang dapat diterima sebagai Pembawa keadilan. Siapakah gerangan orang ataupun badan, jang menurut pendirian itu dapat mendjadi hakim ? Dalam sesuatu badan organisasi biasanja keputusan „pengurus”-njalah jang dianggap resmi dan sah untuk dilaksanakan. Akan tetapi karena keputusan pengurus itu biasanja diambil berdasarkan „kemenangan suara”, maka untuk Lembaga Taman Siswa jang bersifat dan berbentuk „Organisasi Keluarga”, dalam hal-hal istimewa jang tak dapat diselesaikan berdasarkan peraturan-peraturan jang ada, ditjarilah djalan lain. Jaitu pengurus menjerahkan penyelesaian soalnya kepada seseorang atau sebuah badan, jang menurut „kepertjajaan” pengurus tersebut boleh dianggap sebagai orang atau instansi jang „bidjaksana” atau setidaknya lebih bidjaksana daripada fihak-fihak lainnja. Demikianlah oleh Taman Siswa ditetapkan, bahwa jang ditundjuk mendjadi „pemimpin umum” sekaligus diberi hak pula untuk memutuskan segala kesukaran jang setjara organisatoris, jaitu berdasarkan peraturan-peraturan jang ada, tak dapat diselesaikan oleh badan pusatnja, jaitu Madjelis Luhur. Kemudian Persatuan Taman Siswa sendiri dalam salah satu Konggresnja meresmikan pula, bahwa Pemimpin Umum mempunjai „hak leluasa” itu untuk seluruh persatuan.

Meskipun hak ini, salah atau benar, disebut „hak leluasa”, namun hak itu bukanlah sekali-kali hak jang tak terbatas. Adapun batas-batasnja antara lain ialah, bahwa tiap-tiap putusan dari Pemimpin Umum jang tidak berdasar peraturan-peraturan jang tertulis itu, harus selekasnja diberitahukan kepada instansi „Rapat Besar”, yakni Konggres Taman Siswa. Selain itu putusan tersebut harus sesuai atau tidak bertentangan dengan djiwa Taman Siswa. Rapat Besar tersebut sebagai instansi jang tertinggi berhak untuk merubah, bahkan untuk membatalkan putusan istimewa dari Pemimpin Umum tersebut.

Putusan luar-biasa tadi tidak sadja diambil oleh Pemimpin Umum atas permintaan Madjelis Luhur, namun dapat djuga ditetapkan sendiri oleh Pemimpin Umum atas inisiatifnja sendiri, dengan tjatatan, bahwa hal itu diberitahukan kepada Madjelis Luhur lebih dahulu.

Suatu tjontoh ialah putusan Pemimpin Umum mengenai penolakan **ordonansi sekolah liar** (*Wilde scholen Ordonnantie*). Hendaknja diketahui, bahwa undang-undang tersebut sebagai „ontwerp” atau rantjangan Undang-undang sebenarnja telah ditolak oleh „Volksraad”. Namun demikian **setjara diktatoris** Rentjana jang ditolak itu disahkan djuga oleh pemerintah **Hindia Belanda** sebagai ordonansi (tahun 1932).

Berhubung dengan „adem”-nja suasana dalam Volksraad dengan tak adanja satu suara dari pihak anggota-anggota Indonesia dalam „Badan Perwakilan” tersebut jang memprotes tindakan fasistis dari pemerintah Hindia Belanda itu, maka rasa ketjéwa serta tjemas memenuhi djiwa Pemimpin Umum diwaktu itu. Setjara spontaan dengan tidak dimufakatkan lebih dahulu dengan Madjelis Luhur karena tidak ada waktunja lagi, maka Pemimpin Umum mengirimkan kawat kepada Gubernur Djenderal, dalam kawat mana ordonansi tersebut **ditolak dengan tegas**, djustru pada hari akan dilakukan ordonansi tadi. Dapat disini ditambahkan, bahwa penolakan tersebut disertai antjaman, bahwa Persatuan Taman Siswa akan melakukan „**lijdelijk verzet**”.

Segera sesudah kawat itu dikirimkan, maka Madjelis Luhur mengundang Persatuan Taman Siswa untuk mengadakan rapat Madjelis Luhur lengkap di Tosari (tanggal 15 — 16 Oktober 1932) dan Konperensi Pemimpin di Jogjakarta (tanggal 29 — 30 Oktober 1932). Setelah rapat Madjelis Luhur lengkap dan Konperensi Pemimpin menjetudjui sikap Pemimpin Umum, yakni satu-satunja soal jang diperbintjangkan, maka **oleh Madjelis Luhur segera diproklamirkan „lijdelijk verzet”**. Barang tentu kita semua masih ingat segala apa jang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap semua guru Taman Siswa disegenap tjabang-tjabangnja, jang dengan taat sepenuhnja kepada instruksi Madjelis Luhur, tetap memasuki rumah-rumah perguruanja masing-masing, serta melakukan pekerdjaannja sepeti tak ada ordonansi sekolah liar itu. Mereka didjatuhi larangan mengadjar oleh pemerintah-pemerintah setempat, bahkan ada pula jang terus ditangkap dan dimasukkan pendjara. Masih ingat pula kita semua, bahwa pada waktu itu semua partai-partai politik dan golongan-

golongan sosial lainnja memberi bantuan, baik moreel maupun financiëel kepada Taman Siswa. Dengan rasa bangga dan puas dapat kita tuturkan disini, bahwa kemudian atas dorongan anggota-anggota bangsa Indonesia didalam Volksraad, ordonansi sekolah liar jang telah disahkan, bahkan telah dilakukan itu, oleh pemerintah Hindia Belanda ditarik kembali.

Terbuktilah dari apa jang telah kami uraikan diatas itu, bahwa bersatunja massa dengan pimpinannja, berichlasnja pimpinan untuk menjerahkan putusannja kepada pihak jang terpimpin untuk menerima koreksi djika perlu, ditambah pula dengan taatnja segenap anggota keluarga jang semuanya menetapi disiplin dengan tak bersjarat, sungguh benar memberi kekuatan lahir dan batin jang luar-biasa sehingga mendatangkan kemenangan jang gilang-gemilang.

DEMOKRASI KETIMURAN UNTUK MASARAKAT KITA.

Dapat atau tidaknja Demokrasi dan Leiderschap ataupun Demokrasi Terpimpin digunakan untuk keperluan masarakat besar, adalah suatu soal jang pemetjahannja bergantung kepada berbagai faktor. Ada masarakat ketjil jang tidak djauh berbeda sifat dan bentuknja dengan suatu keluarga besar seperti „suku“, di Djawa „trah“, „marga“, „kampung“, dan sebagainya. Disitu biasanja masih hidup atau dihidupkan dengan sengadja beberapa adat-istiadat atau tradisi. Hidup serta penghidupan setjara „gotong-rojong“ atau komunal masih nampak djelas. Sungguhpun disana-sini kadang-kadang didapati gejala-gejala jang merupakan pelanggaran-pelanggaran tata-tertib, namun pada pokoknja masih nampak kesatuan djiwanja penduduk jang tetap berada didalam garis „kerakjatan“ dengan mendjundjung tinggi „pimpinan“ dari adat-istiadat. Terkenallah tata-tenteramnja hidup dilingkungan masarakat jang ketjil tadi. Sekalipun begitu alat-alat dan instansi-instansi kenegaraan harus ada dan tersedia untuk dapat tetap memelihara langsungnja hidup dan penghidupan setjara tertib-damai.

Dikota-kota biasanja mulai nampak hidup dan penghidupan rakjat jang tidak lagi sama bentuk dan isinja serta tjaranja orang bertingkah-laku, djika dibandingkan dengan keadaan didesa-desa dan kampung-kampung. Terbuktilah

disini kebenaran hukum kodrat jang menetapkan, bahwa pergantian alam atau keadaan dan zaman atau masarakat selalu di-ikuti oleh pergantian tjara hidup dan penghidupan. Disamping kerugian dan kemunduran hidup dan kemadjuan bagian-bagian lain dari masarakat. Untuk mendjaga agar hukum Evolusi djangan hendaknja terhalang, maka perlulah hukum kenegaraan dengan tjabang-tjabangnja jang mengenai kemadjuan ekonomi, kesusilaan, kebudajaan dan pemerintahan pada umumnja diatur sebaik-baiknja, sesuai dengan tuntutan alam dan zaman. Tidak usah didjelaskan disini, bahwa dasar segala usaha tadi ialah keselamatan, kebahagiaan hidup rakjat serta tetap hidupnja kepribadian bangsa.

Tentang keadaan dikota-kota besar perlulah diketahui, bahwa selainnja ada pergantian hidup dan penghidupan karena bergantinja alam dan zaman pada umumnja, ada unsur jang istimewa. Unsur itu ialah pengaruh jang tidak ketjil jang berasal dari adab dan kebudajaan dari luar-negeri. Sesudah berabad-abad bergaul dengan Tiongkok dan Arab jang pada umumnja boleh dikata memberi keuntungan jang tidak sedikit dalam bidang kebudajaan, maka datanglah pada abad-abad jang terachir pedagang-pedagang Eropa, yakni Spanjol, Inggeris, Perantjis dan Belanda, jang semuanya pada hakekatnja datang untuk mentjari harta-benda. Dalam keadaan jang demikian barang tentulah kemadjuan rakjat kita tidak pernah mendapat perhatian jang semestinja. Dewan perdagangan Belanda jang terkenal dengan namanya „Oost - Indische Compagnie” berganti bentuk mendjadi „Pemerintah Hindia - Belanda”. Begitulah dengan sendiri tanah tumpah-darah kita mendjadi negeri koloni Belanda. Tak pernah kita ikut pegang penguasa atas negeri kita sendiri. Sebaliknja sampai hidup kedjiwaan kita terus-menerus ditekan dan di-isi dengan djiwa Belanda semata-mata. Berturut-turut sifat-sifat kebatinan „individualisme”, disamping „materialisme” serta „intelektualisme” memenuhi hidup batin rakjat kita. Makin lama makin tipislah tjita-tjita „gotong-rojong” terdapat didalam djiwa rakjat. Djiwa kebendaan Barat terus-menerus mendesak sembojan kepribadian bangsa kita, jang terkenal dengan sembojan : „sepi ing pamrih, ramé ing gawé”. Achirnja segala tjita-tjita keluhuran dan kesutjian batin benar-benar terhalang oleh gerak djiwa jang individualistis, intelektualistis dan materialistis itu. Semua inilah jang menghidupkan djiwa demokrasi jang tak dipimpin oleh „kebidjaksanaan” atau tak mengandung „keadilan sosial”. Dan sebenarnja semua jang diuraikan diatas tadi ialah jang menjebabkan hidup suburnja serta meluap-luapnja demokrasi

jang tak terpimpin, demokrasi „sama-rata” namun tidak dengan „sama-rasa”. Adapun individualisme seperti jang tergambar tadi makin lama makin berkembang, serta menyebabkan makin bertumbuhnja egoisme golongan umumnja, chususnja egoismenja kepartaian dengan „demokrasi”-nja jang selalu menundjukkan tabiat „menang-menangan”, bukannya bekerdja sama dengan menundjukkan „toleransi” sebanjak-banjaknja.

*

UNTUK KOTA - KOTA JANG BERSIFAT INTERNASIONAL.

Ditiap-tiap negara ada kota-kota besar ; diantaranya ada jang bersifat „internasional”, seperti Singapura, Hongkong, Shanghai, dan dinegeri kita boleh dimasukkan kota **Djakarta**. Sifat-sifat internasional itu biasanja dibawa oleh orang-orang asing jang datang menetap dan karenanja sangat mempengaruhi hidup dan penghidupan rakjat. Perkembangan perekonomian umumnja, perdagangan chususnja, kebudajaan, bahkan soal-soal kenegaraan terus-menerus kemasukan pengaruh-pengaruh dari luar negeri, hingga tak mungkin lagilah disitu bentuk-bentuk tradisi nasional murni bertahan. Di-ibukota Djakarta misalnja dapat kita lihat perkembangan berbagai soal jang mengikuti djedjak internasional, baik ekonomis maupun sosial, politis ataupun kulturil, karena terus-menerus kemasukan daja pengaruh dari luar negeri. Berhubung dengan adanja perwakilan-perwakilan dari negara lain, pemerintah kita terpaksa memperhatikan segala pengaruh itu, baik jang bersifat ketimuran maupun kebaratan. Kapital luar negeri sangat kuatnja disitu dibandingkan dengan kapital dalam negeri, sehingga pengaruh dari luar seolah-olah dapat menguasai hidup dan penghidupan dikota tersebut. Lebih-lebih untuk ibukota negara kita Djakarta sifat-sifat atau lebih baik disebut bentuk-bentuk keinternasionalan nampak djelas, karena mulai dulu hingga sekarang kota Djakarta sudah mendjadi pusat penghidupan bangsa-bangsa lain. Dikota-kota besar kita jang lain biasanja lebih mudah orang dapat mempertahankan kepribadian diri dengan berpedoman „asas tri-kon”, jaitu mempertahankan sifat aslinja setjara „kontinu”, mendekati aliran-aliran lain setjara „konvergensi”, achirnja bersatu dengan dunia besar, namun tetap memiliki garis lingkaran hidup sendiri setjara „konsentris”. Baiklah disini di-ingat, bahwa perbedaan

keadaan tadi kadang-kadang menimbulkan pertentangan pikiran antara pusat dan daerah-daerah ; pula mempertebal keyakinan tentang sangat perlunya asas „desentralisasi” atau „otonomi”.

*

PENGARUH HIDUP KEPARTAIAN SETJARA BARAT.

Perbedaan sikap dan laku antara pusat dan daerah-daerah tadi sebenarnya tidak usah menimbulkan perpetjahan. Sajang sekali perselisihan-perselisihan tadi seringkali diper-tadjam karena adanya **hidup kepartaian setjara Barat**. Sedjak tahun 1945 terbukti, bahwa prinsip dan taktik kepartaian itu memetjah-metjah kesatuan rakjat kita dan inilah jang sangat merugikan hidup kenegaraan kita pula. Hidup kepartaian jang kini meradjalela didalam hidup kenegaraan kita itu sebenarnya bukan tradisi internasional, atau tradisi Barat, namun semata-mata merupakan **tradisi Belanda**, jang seperti diketahui di Nederland mempunyai banjak partai-partai. Kalau di Inggeris, di Amerika, di Australia dan negara-negara lainnja jang melakukan „demokrasi liberal” hanya terdapat 2 sampai 3 atau 4 partai, jaitu partai-partai demokrat, liberal, sosialis dan keagamaan, maka di Nederland terdapat banjak partai-partai, diantaranya banjak jang merupakan partai-partai ketjil.

Bahwa rakjat kita meniru belaka tradisi kepartaian di Nederland itu, sebenarnya karena keputusan Kabinet kita jang pertama pada 3 Nopember 1945. Sebelum itu Bung Karno sebagai Presiden telah menggelorakan semangat rakjat untuk mewujudkan suatu „**Gerakan Rakjat Nasional**” dengan maksud agar **segenap rakjat bersatupadu** didalam menghadapi kesulitan dewasa itu. Kesulitan-kesulitan tadi datangnja antara lain dari **Djenderal-djenderal Sekutu**, Komisaris Nederland **R. Abdulkadir Widjojokusumo** sebagai wakil **Van Mook** dan **Van der Plas**. Nampak adanya desakan jang keras dari golongan Sekutu untuk menguasai Indonesia sebagai milik Nederland. Diandjurkan oleh kaum Sekutu kepada Pemerintah Indonesia, **supaja mendirikan partai-partai politik** untuk mendatangkan **demokrasi** didalam **kekuasaan Negara**.

Pada waktu itu, selain R. Abdulkadir nampak datangnja tokoh baru dengan sekonjong-konjong pula, jaitu tokoh **Sutan Sjahrir**, jang sebelumnya dikenal oleh rakjat sebagai

tokoh dari dwitunggal berdampingan dengan Moh. Hatta. Nampak terang disitu peranan St. Sjahrir selaku orang perantara Sekutu, termasuk Belanda dengan Indonesia. Para anggota Kabinet dengan diam-diam menginsjafi dan menjadari akan adanja hal-hal jang luar biasa.

Pada tanggal 3 Nopember 1945 tersebut Kabinet siap untuk bersidang, tetapi Bung Karno tidaklah nampak. Sebaliknya Bung Hatta sebagai Wakil Presiden membuka sidang. Hal jang pertama dikemukakan ialah tentang ditjabutnja andjuran Presiden Sukarno untuk mengadakan Gerakan Rakjat Nasional. Dan sebagai penggantinya maka Wakil Presiden Bung Hatta mewadjibkan Pemerintah, agar mengandjurkan berdirinja partai-partai politik, dengan maksud untuk mendjauhkan pertumbuhan „diktatur”.

Waktu salah seorang Menteri bertanja, apa sebabnja ada perubahan jang mendadak itu dan apakah hal-hal tersebut sudah sesuai dengan pendapat Presiden Sukarno, maka dengan tegas Bung Hatta sebagai ketua sidang Kabinet memberi djawaban jang singkat tapi djelas : „Ja, saja hanja dapat menerangkan, bahwa keputusan itu harus dilakukan dan saja tidak bersedia memberi pendjelasan”.

Sekarang sesudah 13-tahun lamanja kita mendjalani hidup kepartaian, maka dapatlah kiranja kita memahami, bahwa asal-mulanja hidup kepartaian kita menjerupai hidup kepartaian di Eropa-Barat umumnja, di Nederland chususnja, ialah sesudah adanja „decreet” dari Wakil Presiden Bung Hatta.

Kembali kepada soal kata-kata internasional, dimana „Demokrasi ketimuran” tiada lagi mendapat tempat lajak, sedangkan kitapun tidak mungkin memaksa-maksakan sadja, maka timbullah kini pertanjaan, bagaimana sebaiknya djalan jang harus kita tempuh. Sebagai Negara jang telah berbentuk modern, haruslah kita menggunakan segala sjarat dan alat-alat keselamatan dan kebahagiaan, jang memang dengan sengadja ditudjukan kepada hidup rakjat. Ini berarti, bahwa untuk memperlengkap kekurangan, kita wadjib menggerakkan alat-alat perlengkapan negara, jaitu pamongpradja dan kepolisian, pengadilan, ketentaraan, dewan perwakilan rakjat, instansi-instansi pemungut padjak dengan penilik-peniliknja, dan lain-lain, segala-galanja disesuaikan dengan hukum tatanegara jang disebut „trias politica”. Dalam pada itu harus di-ingat, bahwa menurut asas kekeluargaan, sedapat-dapat segala hukuman dan sanksi-sanksi hendaknja ditudjukan kearah perbaikan sipendjahat, dan djangan sampai

menghukum sekedar untuk mendjalankan siksaan sadja mengenai usaha-usaha preventif, namun djuga untuk tindakan-tindakan jang repressif. Ada baiknja diketahui, bahwa menurut tradisi kuno, „Keluarga” mempunjai disiplin „tata-tertib” sendiri, „Disiplin Keluarga” jang tidak èntèng. Pada waktu ini memang hampir tak pernah nampak lagi disiplin jang berat itu, tetapi sedjarah nasional tjukup mengandung bukti-bukti, misalnja tentang seorang radja jang menjiksa puteranja, mengusirnja, sampai-sampai pula menghukum mati. Djadi untuk memelihara ketertiban dan kedamaian hidup rakjat, djangan hendaknja Negara kita ragu-ragu melakukan segala usaha, baik jang bersifat mendidik maupun menghukum. Ini adalah sjarat mutlak untuk mentjegah timbulnja „anarchie”.

*

TUNTUNAN DARI DJIWA BIDJAKSANA.

Sesuai dengan uraian saja dimuka, bahwa „Demokrasi dan Leiderschap” berarti Demokrasi jang mendapat tuntunan dari djiwa atau sikap kebidjaksanaan, maka perlu disini diketengahkan, apakah sekarang jang boleh dianggap „kebidjaksanaan” itu. Sudah saja tegaskan dimuka, bahwa kebidjaksanaan berisikan dua unsur, „kebenaran” dan „keadilan”. Dalam hal ini kita tidak usah mentjari-tjari, karena sebenarnya sedjak rakjat kita dengan djalan revolusi mentjapai kemerdekaan, ada satu tuntunan setjara hukum disjahkan oleh rakjat, jaitu : **Pantjasila**. Dengan dasar-dasarnya Ketuhanan, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Kerakjatan dan Keadilan sosial, maka rakjat tidak membutuhkan pedoman-pedoman lainnja lagi. **Pantjasila** adalah **Djiwa Bidjaksana**.

*

KESIMPULAN.

Untuk djelasnja soal jang setjara luas atau pandjang-lebar tertera diatas semua tadi, maka perlulah menurut anggapan saja dengan ringkas kita tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kalau „Demokrasi dan Leiderschap” atau „Demokrasi Terpimpin” didalam dan untuk hidup keluarga dengan sendiri setjara kodrati terdjadi atau terlaksana, maka untuk masarakat jang lebih besar daripada Keluarga

diperlukan perubahan-perubahan atau pergantian aturan-aturan tata-tertib jang tidak bertentangan dengan djiwa kekeluargaan dan jang sesuai dengan segala keadaan jang berbeda-beda itu.

2. Sebenarnja pokok daripada Demokrasi Terpimpin dibawah pengaruh kebidjaksanaan tidaklah lain daripada keinsjafan dan kesadaran, bahwa pelanggaran tradisi atau peraturan jang menudju kearah tertibnja hidup lahir atau hidup batin, dengan mutlak akan membahayakan hidup diri atau hidup bersama. Dengan sendiri tiap-tiap anggota masarakat jang insjaf dan sadar tadi mendjauhi atau mendjauhkan segala apa jang kiranja dapat mengantjam ketenteraman hidup lahir batin tadi.
3. Bagi mereka jang tidak kurang insjaf dan sadar perlulah adanja peraturan-peraturan jang dapat mengganti segala konsekwensi jang tidak datang dengan sendiri atau setjara kodrati itu.
4. Berhubung dengan itu, maka untuk masarakat jang lebih besar daripada Keluarga, perlulah peraturan-peraturan jang ditudjukan kearah tertib dan damainja hidup lahir dan batin dari segala penduduk dipelihara sebaik-baiknya dan dilaksanakna setjara konsekwen.
5. Untuk itu segala instruksi pemerintah khususnja atau kenegaraan pada umumnja jang bertugas memelihara tertib - damai hidup masarakat tadi, tak sekali-kali boleh bersikap lengah atau atjuh tak atjuh, agar tidak kehilangan kewibawaan. Tiap-tiap pelanggaran harus segera dituntut dan diadili sebagaimana mestinja.
6. Bila tiap-tiap anggota dari masarakat besar benar-benar merasakan adanja antjaman hukuman jang tak dapat ditawar-tawar itu, maka inilah dengan sendiri akan merupakan demokrasi jang tak akan meluap-luap mendjadi anarchie, dan inilah bentuknja Demokrasi Terpimpin untuk masarakat besar.
7. Adapun Pemimpin Kebidjaksanaan seperti telah saja singgung-singgung dimuka, tidak lain ialah : asas „trias politica” dengan puntjaknja „PANTJASILA”.

PERTJETAHAN - PENERBITAN - TOKO BUKU & ALAT TULIS
TAMAN SISWA

Djl. Tamansiswa 6 - 8 Telp. 42 JOGJAKARTA.

Telah terbit !

Pesanlah segera !

1. URAIAN MANIPOL

oleh : *R. Djadji Darmowijono* (anggota Team Indoktrinasi Tingkat II Malang) Direstui dengan Kata Pengantar dari J.M. Wampa Bidang Khusus / Menteri Penerangan / Ketua Panitia Indoktrinasi Dr. H. Roeslan Abdulgani.

Uk.: 15 × 22 cm. - Tebal: 160 pag. Harga perbuku Rp. 200,—.

2. ASAS - ASAS dan DASAR - DASAR TAMAN SISWA

oleh : *Ki Hadjar Dewantara.*

Buku ini telah berulang kali ditjetak mengingat masih banyak sekali permintaan², kini kami terbitkan kembali, dengan harapan semoga terpenuhilah kebutuhan masjrakat jang ingin memperdalamnja. - Tjetakan ketiga.

Uk.: 15 × 22 cm. - Tebal: 32 pag. Harga perbuku Rp. 50,—.

3. MASALAH KEBUDAJAAN

Kenang²an promosi Doktor Honoris Causa Ki Hadjar Dewantara. Pidato Rector Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. M. Sardjito ; Pidato² sambutan *Ki Hadjar Dewantara*, P.J.M. Presiden Soekarno, Menteri P.P. dan K. Sarino Mangunpranoto dan Bapak Semaun. - Tjetakan kedua.

Uk.: 15 × 22 cm. - Tebal: 40 pag. Harga perbuku Rp. 65,—.

Masih sedia buku - buku :

4. PERDJUANGAN dan ADJARAN HIDUP KI HADJAR DEWANTARA

oleh : *Mochammad Tauchid.*

Diuraikan setjara populer, dan dipersembahkan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk lebih mengenal pahlawan nasional dan tokoh pendidikan — kebudajaan Dr. Ki Hadjar Dewantara serta adjaran hidupnja.

Uk.: 15 × 22 cm. - Tebal: 68 pag. Harga perbuku Rp. 85,—.

*

Harga buku² tersebut diatas ditambah ongkos kirim 15 %, sedikitnja Rp. 25,—.

Pesanan dalam djumlah 10 — 24 buku dapat potongan 10 %.

25 — 49 " " " 15 %.

" " " 50 — 99 " " " 15 %.

" " " 100 buku atau lebih " " " 15 %.

Melulu untuk Toko² Buku dan Tjabang² Taman Siswa dapat potongan 30 %. Pesanan harap disertai uang pembayarannja.